

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Distribusi Frekuensi Kasus GHPR dan Faktor Lingkungan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022
 - a. Jumlah kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 (468 kasus). Sedangkan, kasus GHPR terendah terjadi pada bulan Agustus 2021 (248 kasus).
 - b. Kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak terjadi pada umur 20-45 tahun (3.376 (28%) kasus) dan lebih banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki.
 - c. Cakupan vaksinasi HPR di Provinsi Sumatera Barat tertinggi terjadi pada bulan November 2020 (9.962 HPR). Sedangkan, cakupan vaksinasi HPR terendah terjadi pada bulan Januari 2022 (12 HPR).
 - d. Suhu (rata-rata) di Provinsi Sumatera Barat tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020 (27,5°C). Sedangkan, suhu (rata-rata) terendah terjadi pada bulan November 2022 (24,8°C).
 - e. Curah hujan (rata-rata) di Provinsi Sumatera Barat tertinggi terjadi pada bulan November 2020 (446 mm). Sedangkan, curah hujan (rata-rata) terendah terjadi pada bulan Juli 2021 (119 mm).
2. Analisis (Gambaran) Spasial Kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022
 - a. Sebaran kasus GHPR berdasarkan jumlah kasus di kabupaten/kota se- Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 lebih banyak berada pada

kategori tinggi (delapan dari 19 kabupaten/kota). Pada tahun 2021, sebagian besar hampir sama dalam kategori jumlah kasus GHPR seperti pada tahun sebelumnya, namun terdapat tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang kategorinya berubah dari kategori tinggi menjadi sedang. Pada tahun 2022, kasus GHPR mengalami peningkatan kembali dari tahun 2021, di mana lebih banyak kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori tinggi dan sedang (masing-masing tujuh kabupaten/kota).

- b. Sebaran kasus GHPR berdasarkan IR di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 lebih banyak berada pada kategori tinggi dan sedang (masing-masing tujuh kabupaten/kota). Pada tahun 2021, mengalami penurunan kasus di mana lebih banyak kabupaten/kota berada pada kategori rendah (delapan kabupaten/kota). Sedangkan, pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi lebih banyak kabupaten/kota berada pada kategori tinggi (tujuh kabupaten/kota).
- c. Sebaran kasus GHPR berdasarkan jenis hewan penyebab terbanyak di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2022 lebih banyak disebabkan oleh HPR anjing.

3. Hubungan antara Faktor Lingkungan dengan Kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Dari hasil penelitian, tidak ditemukan hubungan yang bermakna secara signifikan di antara ketiga faktor lingkungan mencakup cakupan vaksinasi HPR, suhu, dan curah hujan dengan kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2022.

6.2 Saran

1. Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat diharapkan adanya evaluasi dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pencatatan dan pelaporan ke depannya terkait vaksinasi HPR (vaksinasi pertama dan vaksinasi lanjutan/*booster*) serta penjelasan terkait HPR peliharaan atau liar yang divaksin, juga diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus GHPR dari jenis HPR peliharaan atau liar, untuk membantu dalam menyediakan data dalam penelitian terkait hubungan antara faktor cakupan vaksinasi HPR dengan kasus GHPR agar memperoleh hasil yang seharusnya (lebih akurat).
2. Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait diharapkan melakukan peningkatan aktivitas vaksinasi pada HPR secara rutin hingga mencapai batas minimal cakupan vaksinasi yakni 70% dari HPR (Kemenkes), meskipun tidak terjadi kasus GHPR sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus GHPR.
3. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diharapkan melakukan kerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam melakukan penyebaran informasi terkait GHPR sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan menyebabkan penurunan pada kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat diharapkan melakukan kerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, dinas kesehatan di kabupaten/kota, dinas peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota, lembaga/instansi pemerintahan setempat,

lembaga/instansi terkait lainnya serta masyarakat dalam melakukan peningkatan pemantauan terutama untuk daerah yang lebih berisiko terjadinya kasus GHPR seperti pada daerah kabupaten/kota dengan kategori tinggi yang ditampilkan pada peta sebelumnya.

5. Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota diharapkan melakukan intervensi pengendalian yang langsung menargetkan HPR terutama anjing, misalnya dengan mengintensifkan penangkapan anjing dan HPR lainnya yang berkeliaran bebas ketika HPR lebih aktif bergerak yang terjadi pada musim tertentu (bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta BMKG di Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh data iklim seperti suhu dan curah hujan).
6. Kepada masyarakat terutama pihak pemelihara HPR, diharapkan dapat melakukan vaksinasi dan perawatan bagi HPR secara berkala agar terhindar dari penyakit dan berdampak terhadap adanya kasus GHPR.
7. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terkait faktor-faktor lainnya, contohnya karakteristik dan perilaku HPR, faktor kedekatan/jarak antar daerah, faktor kepadatan/jumlah penduduk, kondisi masyarakat/daerah tertentu yang lebih spesifik (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat), kepemilikan HPR yang kemungkinan berisiko untuk meningkatkan kasus GHPR di Provinsi Sumatera Barat.